

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**



MUHAMMAD DANANG PRATAMA

NIM. 1910211310068

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, September 2023

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**



MUHAMMAD DANANG PRATAMA

NIM. 1910211310068

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, September 2023

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD DANANG PRATAMA

NIM. 1910211310068

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, September 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD DANANG PRATAMA
NIM. 1910211310068**

Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, Tanggal 6
September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

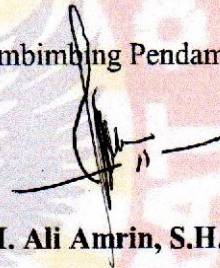
Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H, M. Hadin Muhjad, S.H., Mhum

NIP. 196004181986031002

Pembimbing Pendamping,



M. Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP. 196504221995121001

Diketahui

Banjarmasin, 6 September 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**

Diajukan Oleh

Muhammad Danang Pratama

NIM. 1910211310068

Skripsi ini memenuhi syarat untuk
disahkan sebagai persyaratan yudium

Nomor

: 531/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

: 22 SEP 2023

Disahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan
dipertahankan di depan sidang panitia
penguji

pada Hari Rabu Tanggal 6 September 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Lies Ariany, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Pembimbing ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 1205/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 5 Agustus 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Danang Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310068
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 25 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasim, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Danang Pratama

NIM 1910211310068

MOTO

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.

(Tom Bodett)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

(QS. Al-Baqarah Ayat 216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mamah tersayang,

Sebagai tandak bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada papah dan mamah, **Rachmat Latief, S. E.** dan **Shanty Herawati Martini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhamu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. DR. Muhammad Hadin, S. H., M. H.** Dan Bapak **M. Ali Amrin, S.H, M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH).

(MUHAMMAD DANANG PRATAMA, 2023,... hlm)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian suatu daerah.

Perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis Kedudukan Hukum Pengusaha Perdagangan Sebagai Wajib Pajak Daerah (Tinjauan Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan berupa studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa norma-norma hukum. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang penulis teliti sehingga memberikan kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini.

Hasil Penelitian yang telah didapatkan bahwa:

1. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha atau individu yang terkena pajak daerah, dalam hal ini masih banyak jenis usaha yang tidak taat pajak dikarenakan penghasilan yang tidak tetap yang dimana penghasilannya relatif rendah, pemerintah harus lebih mendukung terhadap jenis usaha tersebut dengan cara menanggulangi, memberikan dukungan maupun pembinaan usaha terhadap pelaku usaha agar lebih memperhatikan pengusaha kecil dengan memberikan peminjaman modal atau penyuluhan secara rutin terhadap pelaku usaha
2. Masih sangat banyak pengusaha yang meremehkan kewajiban dalam pembayaran pajak dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha tentang perpajakan, pendapatan toko yang tidak menetap, pendapatan yang relatif rendah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengusaha kecil dimana pemerintah lebih memperhatikan para pengusaha besar karena dianggap lebih banyak memberikan keuntungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan usaha lokal seperti toko kelontong ini dengan cara melakukan penyuluhan tentang pajak dan pembinaan usaha.

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB
PAJAK DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)**

ABSTRAK

MUHAMMAD DANANG PRATAMA (1910211310068) dengan judul skripsi “KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)”. Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Pajak dan penambahan jenis Pajak.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antardaerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha atau individu yang terkena pajak daerah, dalam hal ini masih banyak jenis usaha yang tidak taat pajak dikarenakan penghasilan yang tidak tetap yang dimana penghasilannya relatif rendah, pemerintah harus lebih mendukung terhadap jenis usaha tersebut dengan cara menanggulangi, memberikan dukungan maupun pembinaan usaha terhadap pelaku usaha agar lebih memperhatikan pengusaha kecil dengan memberikan peminjaman modal atau penyuluhan secara rutin terhadap pelaku usaha.

Kedua, Masih sangat banyak pengusaha yang meremehkan kewajiban dalam pembayaran pajak dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha tentang perpajakan, pendapatan toko yang tidak menetap, pendapatan yang relatif rendah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengusaha kecil dimana pemerintah lebih memperhatikan para pengusaha besar karena dianggap lebih banyak memberikan keuntungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan usaha lokal seperti toko kelontong ini dengan cara melakukan penyuluhan tentang pajak dan pembinaan usaha.

Kata Kunci : Hukum Pajak, Tarif Pajak, Retrebusi Pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA PERDAGANGAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH (TINJAUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat muslim di dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan tulus hati mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam memberikan arahan, petunjuk, saran, serta dukungan terhadap penulis.

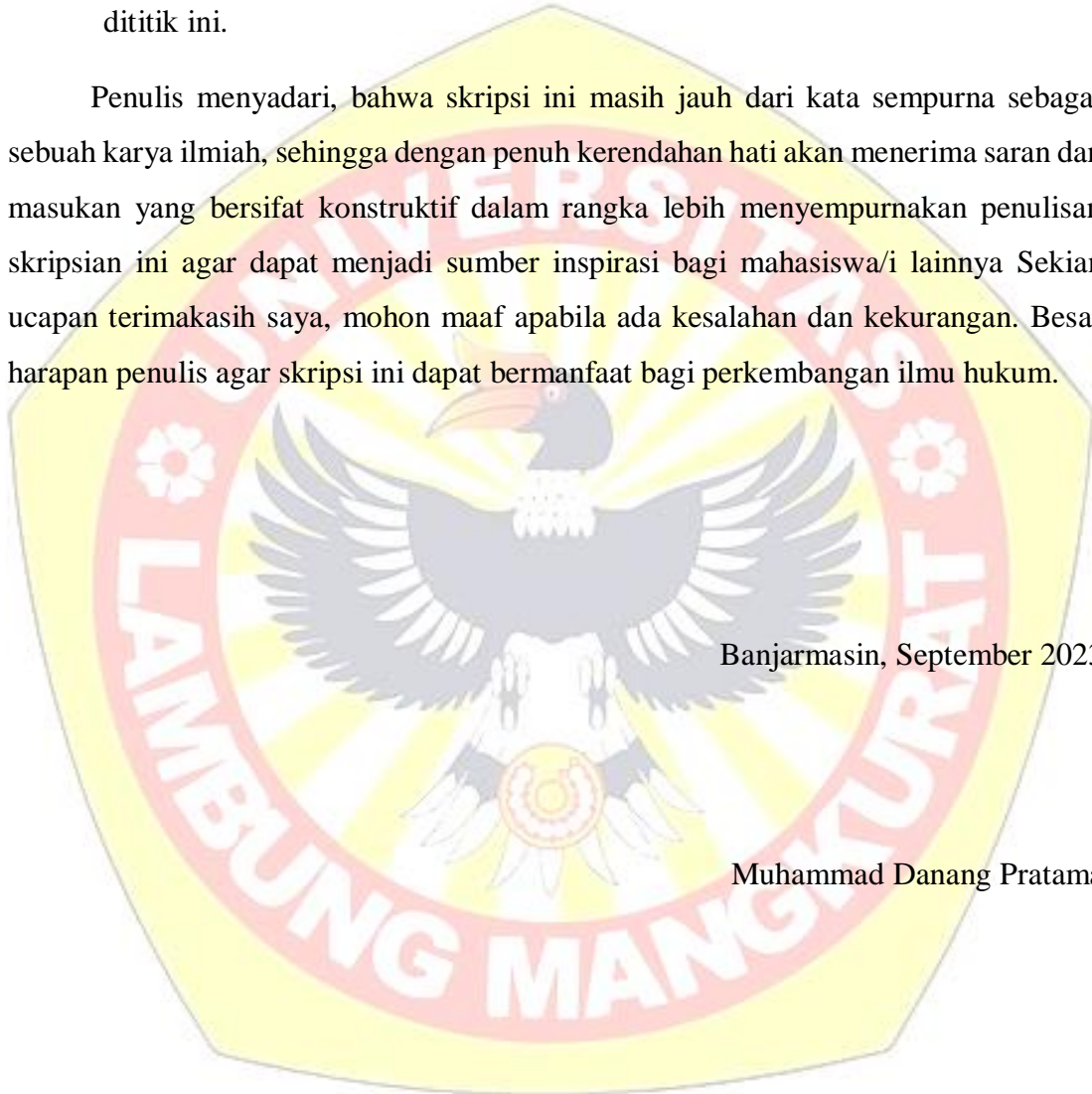
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hadin, S. H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak membantu memberikahkan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak M. Ali Amrin, S.H, M.H. selaku pembimbing kedua yang juga yang telah banyak membantu memberikahkan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sekaligus dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepada seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada orang tua penulis yaitu Papah, Rachmat Latief, S. E. dan Mamah Shanty Herawati. yang penulis teramat sayangi yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
9. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis yang penulis kasihi yang telah memberikan banyak dukungan dan senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun;
10. Kepada sahabat seperjuangan, Shalli Mursalin, Andi Eki Fitra Rizky Ramadhani, Muhammad Irham Syauqi, Reza Fadhila, Najmi Lawana, Muhammad Nur Rahmatillah, S. H., Muhammad Hafiz Akbar, Rafii Ramadhan, Priztyawan, Muhammad Alief Rizqy.
11. Kepada sahabat baik penulis terkhusus Grup *TKG* dan *Qwerty* yang telah menegur atau menasehati serta membantu penulis;

12. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penelitian baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan sehingga skripsi ini selesai tepat waktu;
13. Terakhir kepada diri sendiri yang bisa menyelesaikan penulisan dan bisa ada dititik ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, sehingga dengan penuh kerendahan hati akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan penulisan skripsian ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa/i lainnya. Sekian ucapan terimakasih saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, September 2023

Muhammad Danang Pratama



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | ix |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB 1..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 13 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 15 |

| | |
|---|--------------|
| 3. Tipe Penelitian..... | 15 |
| 4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 15 |
| 5. Pengumpulan Bahan Hukum..... | 16 |
| 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 16 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Pajak dan Retribusi Daerah..... | 19 |
| B. Jenis – Jenis Pajak..... | 24 |
| C. Tata Cara Pemungutan Pajak..... | 28 |
| BAB III..... | 30 |
| PEMBAHASAN..... | 30 |
| 1. Jenis Usaha Perdagangan Yang Dikenakan Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009..... | 30 |
| 2. Sanksi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..... | 35 |
| BAB IV..... | 47 |
| PENUTUP..... | 47 |
| A. Kesimpulan..... | 47 |
| B. Saran..... | 49 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | |
| DAFTAR PUSTAKA | |

